



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023

Bagian Anggaran 018.02.



**Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri Pertanian sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Pertanian yang dipimpinnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*).



Jakarta, 15 Februari 2024
PII INSPEKTUR JENDERAL

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr
NIP. 19640623 198903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 15 Februari 2024
Pit. INSPEKTUR JENDERAL

Prof. Dr. W. Dedi Nursyamsi, M. Agr
NIP. 19640623 198903 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah–kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran TA.2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp148.650.007,00 atau mencapai 991 persen dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp15.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2023 adalah senilai Rp127.765.411.183,00 atau mencapai 97,51 persen (pembulatan 98 persen) dari alokasi anggaran senilai Rp131.030.528.000,00.

2. NERACA

Neraca TA.2023 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan senilai Rp8.506.322.306,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp450.740.079,00 Aset Tetap (*netto*) senilai Rp7.860.839.145,00, dan Aset Lainnya (*netto*) senilai Rp194.743.082,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp27.651.791,00 dan Rp8.506.322.306,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional TA.2023 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp4.518.018,00 , sedangkan jumlah

Beban Operasional adalah senilai Rp128.901.599.819,00 sehingga Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp128.897.081.801,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp93.431.989,00 dan nihil, sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp128.803.649.812,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas TA.2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah Rp11.039.122.682,00 ditambah Defisit-LO senilai Rp128.803.649.812,00 ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp126.243.197.645,00 sehingga terdapat Penurunan Ekuitas senilai Rp2.560.452.167,00 dan menghasilkan Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp8.478.670.515,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA.2023 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 disusun dan disajikan menggunakan Basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan Basis Akrua.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% thd Anggaran	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	15.000.000	148.650.007	991	230.097.848
JUMLAH PENDAPATAN		15.000.000	148.650.007	991	230.097.848
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	20.922.074.000	20.083.061.711	96	21.134.386.762
Belanja Barang	B.4	106.528.249.000	104.178.265.076	98	71.046.177.215
Jumlah Belanja Operasi		127.450.323.000	124.261.326.787	97	92.180.563.977
Belanja Modal	B.5				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.5.1	2.392.336.000	2.352.284.674	98	2.107.300.200
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	B.5.2	-	-	-	90.909.000
Belanja Modal Lainnya	B.5.3	949.190.000	922.790.281	97	402.972.861
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	B.5.4	238.679.000	229.009.441	96	189.110.423
Jumlah Belanja Modal		3.580.205.000	3.504.084.396	98	2.790.292.484
JUMLAH BELANJA		131.030.528.000	127.765.411.183	98	94.970.856.461

II. NERACA

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	14.541.856	50.700.000	(36.158.144)	(71,32)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.2	-	(253.500)	253.500	(100,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.3	14.541.856	50.446.500	(35.904.644)	(71,17)
Persediaan	C.1.4	436.198.223	542.477.735	(106.279.512)	(19,59)
Jumlah Aset Lancar		450.740.079	592.924.235	(142.184.156)	(23,98)
Aset Tetap	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	41.739.519.608	40.144.672.434	1.594.847.174	3,97
Gedung dan Bangunan	C.2.2	329.071.000	329.071.000	-	-
Jalan, Irigasi, dan jaringan	C.2.3	164.500.000	164.500.000	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	107.231.970	107.231.970	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(34.479.483.433)	(30.536.785.809)	(3.942.697.624)	12,91
Jumlah Aset Tetap		7.860.839.145	10.208.689.595	(2.347.850.450)	(23,00)
Aset Lainnya	C.3				
Aset tak Berwujud	C.3.1	3.386.471.969	3.157.462.528	229.009.441	7,25
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(3.191.728.887)	(2.849.450.393)	(342.278.494)	12,01
Jumlah Aset Lainnya		194.743.082	308.012.135	(113.269.053)	(36,77)
JUMLAH ASET		8.506.322.306	11.109.625.965	(2.603.303.659)	(23,43)
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	27.651.791	70.503.283	(42.851.492)	(60,78)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.651.791	70.503.283	(42.851.492)	(60,78)
JUMLAH KEWAJIBAN		27.651.791	70.503.283	(42.851.492)	(60,78)
EKUITAS	C.5				
Jumlah Ekuitas		8.478.670.515	11.039.122.682	(2.560.452.167)	(23,19)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.506.322.306	11.109.625.965	(2.603.303.659)	(23,43)

III. LAPORAN OPERASIONAL

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	4.518.018	-
JUMLAH PENDAPATAN		4.518.018	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	20.039.633.661	17.959.940.015
Beban Persediaan	D.3	1.054.915.174	980.322.219
Beban Barang dan Jasa	D.4	20.097.491.299	6.939.942.591
Beban Pemeliharaan	D.5	2.254.747.595	1.726.846.816
Beban Perjalanan Dinas	D.6	80.863.425.222	41.909.176.974
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.591.640.368	2.300.737.722
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(253.500)	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		128.901.599.819	71.816.966.337
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(128.897.081.801)	(71.816.966.337)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		86.781.989	176.969.998
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.650.000	9.127.550
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	93.431.989	186.097.548
SURPLUS / DEFISIT LO		(128.803.649.812)	(71.630.868.789)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	11.039.122.682	12.899.141.888
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(128.803.649.812)	(96.626.136.494)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(76.792.760)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	126.243.197.645	94.842.910.048
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.560.452.167)	(1.860.019.206)
EKUITAS AKHIR	E.6	8.478.670.515	11.039.122.682

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai instansi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bisa mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 288 orang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Fungsi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dan perannya sebagai *Quality Assurance dan Advisory Services* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Permentan No. 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
4. Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian dan Inspektorat Jenderal.
5. Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

A. 1.1 VISI DAN ARAH PENGAWASAN

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian selama lima tahun serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan Visi yaitu ***"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"***.

2. Arah Pengawasan

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang meliputi:

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pertanian; serta;
- c. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian;
- b. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan arah pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi;
 - b. Nilai Penguatan Pengawasan Internal;
 - c. Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP.
2. Terwujudnya Akuntabilitas kinerja di Kementerian Pertanian dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A.1.3. SASARAN

Pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 revisi kedua, Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis butir 5 yaitu terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel, dengan mendukung Program Dukungan

Manajemen. Berikut Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dalam Renstra Inspektorat Jenderal Revisi:

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima. Dengan Indikator Kinerja Program (IKSP) sebagai berikut:
 - a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal;
 - b. *Level Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal;
 - c. Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian;
 - d. Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
 - e. Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit Eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - f. Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu inspektorat Jenderal di lingkungan kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti.
2. Terkelolanya Anggaran Kementan yang Akuntabel dan Berkualitas. Dengan Indikator Kinerja Program (IKSP) yaitu Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

A.1.3. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan

informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terdapat 2 jenis kegiatan pada Program Dukungan Manajemen yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Layanan dan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian. Progres Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2023 pada satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah 95,07%, dengan progres persentase pencapaian output sebesar 100%, dapat dilihat pada lampiran A.1.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang mempunyai konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dan nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI Eselon I.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan *First In First Out* (FIFO) sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode *First In First Out* (FIFO), bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang
Jangka
Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara yang bertujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai yang tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud (ATB) Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp148.650.007,
00

1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2023 adalah senilai Rp148.650.007,00 atau mencapai 991 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak memiliki potensi PNBPN, sehingga estimasi pendapatan tahun 2023 hanya ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Dan adanya pandemi *Covid-19* tidak berdampak pada Pendapatan PNBPN Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.1

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3X100
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000	86.781.989	-	86.781.989	579
425793	Pendapatan denda dari Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	4.518.018	-	4.518.018	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	57.350.000	-	57.350.000	-
Total		15.000.000	148.650.007	-	148.650.007	991,00

Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 senilai Rp148.650.007,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN dari hasil penjualan aset tetap berupa 2 (dua) unit kendaraan operasional kantor roda 4 milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian senilai Rp86.781.989,00 dengan Nomor NTPN 886460N9VRR94RQE tanggal 21 Desember 2023, dengan Risalah Lelang Nomor 1269/26/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2. Pendapatan denda dari penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp4.518.018,00 yang merupakan denda keterlambatan kepada pihak ketiga terhadap pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2023.

3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp57.360.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel B.1.2
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	NILAI	Keterangan
1	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Agung Setyawan, STP	Rp 15.750.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional dari Maret 2019 sampai Januari 2022 (Rp450.000 X 35 bulan)
2	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Ika Setiasih, SP	Rp 14.700.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Maret 2019 sampai dengan November 2020 (Rp700.000 X 21 bulan)
3	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Dara Puspita, SP	Rp 15.750.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Maret 2019 sampai dengan Januari 2022 (Rp450.000 X 35 bulan)
4	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Sutresno	Rp 4.500.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 (Rp450.000 X 10 bulan)
5	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Akso Diana, S.TP	Rp 700.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional bulan Januari 2022
6	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Pratiwi Noviana, S.Ikom	Rp 900.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional bulan Maret-Agustus 2022, Gaji ke 13 dan THR tahun 2022 senilai Rp3.600.000,00, telah disetor pada tanggal 16 September 2022 senilai Rp2.700.000,00 dan sisanya senilai Rp900.000,00 disetorkan pada tanggal 27 April 2023
7	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Eva Ratna Sugiharti, S.P	Rp 900.000	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional bulan Maret-Agustus 2022, Gaji ke 13 dan THR Tahun 2022 senilai Rp3.600.000,00, telah disetor pada tanggal 16 September 2022 senilai Rp2.700.000,00 dan sisanya senilai Rp900.000,00 disetorkan pada tanggal 27 April 2024
8	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Dara Puspita, SP	Rp 1.350.000	Kelebihan Tunjangan Fungsional karena Cuti Besar
9	Kelebihan pembayaran tunjangan Fungsional Auditor an. Akso Diana, S.TP	Rp 2.800.000	Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional bulan September sampai dengan Desember 2021
	Total	Rp 57.350.000	

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 mengalami menurun senilai Rp81.447.841,00 atau 35,40 persen jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022.

Tabel B.1.3
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Kenaikan /	
	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	86.781.989	-	86.781.989	220.970.298	-	220.970.298	(134.188.309)	(60,73)
Pendapatan Penyelesaian Ganti kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak	-	-	-	8.952.250	-	8.952.250	(8.952.250)	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	4.518.018	-	4.518.018	-	-	-	4.518.018	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	57.350.000	-	57.350.000	175.300	-	175.300	57.174.700	32.615,35
Jumlah Pendapatan	148.650.007	-	148.650.007	230.097.848	-	230.097.848	(81.447.841)	(35,40)

Penurunan Realisasi PNBP pada Tahun 2023 yang paling signifikan yaitu pada pendapat dari pemindahtanganan BMN yang karena pendapatan lelang pada tahun 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

Nilai realisasi PNBP per 31 Desember 2023 pada aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) adalah senilai Rp148.650.007,00 dan pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Itjentan senilai Rp Rp57.350.000,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp91.300.007,00 yang merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan (tahun 2023) yang disetor melalui potongan SPM sehingga tidak tercatat pada aplikasi SIMPONI senilai Rp4.518.018,00 dan setoran pendapatan lelang senilai Rp Rp86.781.989,00 yang disetor oleh KPKNL melalui KPPN Jakarta II.

Realisasi Belanja Negara
Rp127.765.411.183,00

B.2. BELANJA

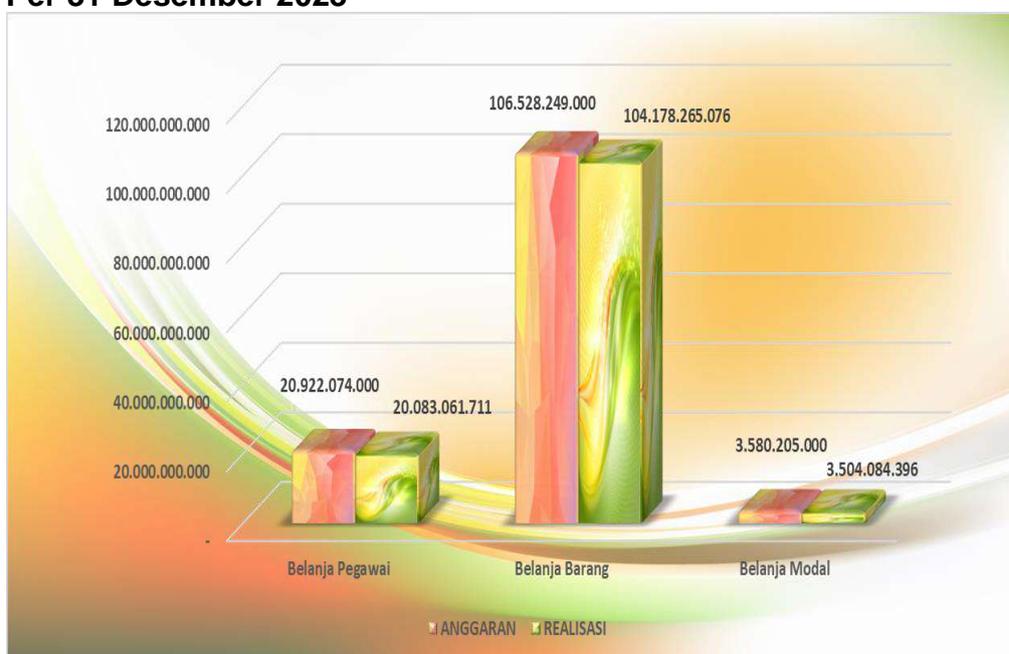
Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (*netto*) per 31 Desember 2023 senilai Rp127.765.411.183,00 atau 97,51 persen (pembulatan 98 persen) dari anggaran senilai Rp131.030.528.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp1.155.158.778,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel B.2.1.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3X100
51	Belanja Pegawai	20.922.074.000	20.103.964.333	20.902.622	20.083.061.711	95,99
52	Belanja Barang	106.528.249.000	105.312.520.233	1.134.255.157	104.178.265.076	97,79
53	Belanja Modal	3.580.205.000	3.504.085.395	999	3.504.084.396	97,87
Total Belanja		131.030.528.000	128.920.569.961	1.155.158.778	127.765.411.183	97,51

Grafik B.2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023



Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian awalnya mengelola Rp154.221.814.000,00 dan dalam tahun anggaran telah dilakukan 9 kali Revisi DIPA sehingga Pagu setelah revisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp131.030.528.000,00, (rincian Penjelasan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 terlampir pada Lampiran B3).

Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.2
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran
Per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan Lain-lain	15.000.000	15.000.000	-
Jumlah Pendapatan	15.000.000	15.000.000	-
Belanja			
Belanja Pegawai	23.213.360.000	20.922.074.000	2.291.286.000
Belanja Barang	124.155.749.000	106.528.249.000	17.627.500.000
Belanja Modal	6.852.705.000	3.580.205.000	3.272.500.000
Jumlah Belanja	154.221.814.000	131.030.528.000	23.191.286.000

Pada Tahun 2023 telah dilakukan 9 kali Revisi DIPA, rincian Penjelasan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 terlampir pada Lampiran A1.

Total anggaran 2023 senilai Rp154.221.814.000,00 dialokasikan untuk penanganan pandemi *Covid-19* senilai Rp38.722.000,00 dan terealisasi senilai Rp20.717.160,00 atau 53,50 persen dari total anggaran. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B.2.3
Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi Netto	%	Anggaran 2022	Realisasi Netto	%	Kenaikan / Penurunan	
		(Rp)	31-Dec-23		(Rp)	31-Dec-22		(Rp)	%
			(Rp)			(Rp)			
51	Belanja Pegawai	20.922.074.000	20.083.061.711	95,99	22.895.923.000	21.134.386.762	92,31	(1.051.325.051)	3,68
52	Belanja Barang	106.528.249.000	104.178.265.076	97,79	71.564.167.000	71.046.177.215	99,28	33.132.087.861	(1,48)
53	Belanja Modal	3.580.205.000	3.504.084.396	97,87	3.000.000.000	2.790.292.484	93,01	713.791.912	4,86
	Jumlah	131.030.528.000	127.765.411.183	97,51	97.460.090.000	94.970.856.461	97,45	32.794.554.722	0,06

Realisasi Belanja (*netto*) yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan senilai Rp32.794.554.722,00 dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022, karena meningkatnya anggaran tahun 2023 untuk kegiatan startegis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Belanja Pegawai

B.3. BELANJA PEGAWAI

Rp20.083.061.71

1,00

Realisasi Belanja Pegawai (*netto*) adalah Realisasi Belanja Pegawai per tanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (*netto*) per 31 Desember 2023 senilai Rp20.083.061.711,00 atau sebesar 96 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp20.922.074.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp20.902.622,00.

Tabel B.3.1**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Gaji Pokok PNS	15.151.404.000	14.475.737.520	7.806.800	14.467.930.720	95,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	219.000	217.099	327	216.772	98,98
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.021.358.000	1.019.472.272	780.680	1.018.691.592	99,74
Belanja Tunjangan anak PNS	303.132.000	302.886.468	312.272	302.574.196	99,82
Belanja Tunjangan Struktural PNS	232.050.000	232.050.000	-	232.050.000	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.249.212.000	2.249.062.000	2.930.000	2.246.132.000	99,86
Belanja Tunjangan PPH PNS	125.570.000	125.479.090	48.033	125.431.057	99,89
Belanja Tunjangan Beras PNS	762.076.000	761.279.040	579.360	760.699.680	99,82
Belanja Uang Makan PNS	878.789.000	744.665.000	-	744.665.000	84,74
Belanja Tunjangan Umum PNS	174.685.000	174.685.000	8.445.150	166.239.850	95,17
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.866.000	11.866.000	-	11.866.000	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	164	-	164	16,40
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.186.000	-	-	-	-
Belanja Tunjangan anak PPPK	237.000	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.160.000	2.160.000	-	2.160.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	292.000	289.680	-	289.680	99,21
Belanja Uang Makan PPPK	2.800.000	962.000	-	962.000	34,36
Belanja Uang Lembur	5.037.000	3.153.000	-	3.153.000	62,60
Jumlah Belanja Pegawai	20.922.074.000	20.103.964.333	20.902.622	20.083.061.711	95,99

Pengembalian Belanja senilai Rp20.902.622,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS tahun berjalan.

Realisasi Belanja Pegawai (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp20.083.061.711,00 dan Rp21.134.386.762,00.

Tabel B.3.2
Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15.151.404.000	14.475.737.520	95,54	15.482.222.000	14.976.672.080	96,73	(500.934.560)	(1,19)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	219.000	217.099	99,13	330.000	215.618	65,34	1.481	33,79
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.021.358.000	1.019.472.272	99,82	1.220.000.000	1.072.672.284	87,92	(53.200.012)	11,89
Belanja Tunjangan anak PNS	303.132.000	302.886.468	99,92	375.000.000	310.205.932	82,72	(7.319.464)	17,20
Belanja Tunjangan Struktural PNS	232.050.000	232.050.000	100,00	533.840.000	253.690.000	47,52	(21.640.000)	52,48
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.249.212.000	2.249.062.000	99,99	2.320.304.000	2.295.669.000	98,94	(46.607.000)	1,06
Belanja Tunjangan PPH PNS	125.570.000	125.479.090	99,93	140.145.000	126.852.339	90,52	(1.373.249)	9,41
Belanja Tunjangan Beras PNS	762.076.000	761.279.040	99,90	798.960.000	795.461.280	99,56	(34.182.240)	0,33
Belanja Uang Makan PNS	878.789.000	744.665.000	84,74	1.553.695.000	1.103.811.000	71,04	(359.146.000)	13,69
Belanja Tunjangan Umum PNS	174.685.000	174.685.000	100,00	332.035.000	203.050.000	61,15	(28.365.000)	38,85
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.866.000	11.866.000	100,00	-	-	-	11.866.000	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	164	16,40	-	-	-	164	16,40
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.186.000	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunjangan anak PPPK	237.000	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.160.000	2.160.000	100,00	-	-	-	2.160.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	292.000	289.680	99,21	-	-	-	289.680	99,21
Belanja Uang Makan PPPK	2.800.000	962.000	34,36	-	-	-	962.000	34,36
Belanja Uang Lembur	5.037.000	3.153.000	62,60	139.392.000	4.239.000	3,04	(1.086.000)	59,56
Jumlah Belanja Pegawai (Bruto)	20.922.074.000	20.103.964.333	96,09	22.895.923.000	21.142.538.533	92,34	(1.038.574.200)	3,75
Pengembalian Belanja	-	20.902.622	-	-	8.151.771	-	12.750.851	-
Jumlah Belanja Pegawai (Netto)	20.922.074.000	20.083.061.711	95,99	22.895.923.000	21.134.386.762	92,31	(1.051.325.051)	3,68

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.051.325.051,00 yang disebabkan adanya pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang pension, namun secara persentase jika dibandingkan dengan anggaran meningkat sebesar 3,68 persen.

Belanja Barang
Rp104.178.265.
076,00

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang (*netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*netto*) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp104.178.265.076,00 atau 98 persen (pembulatan 97,79 persen) dari Pagu Anggaran senilai Rp106.528.249.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp1.134.255.157,00.

Tabel B.4.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Keperluan Perkantoran	1.402.503.000	1.395.213.153	8.983.131	1.386.230.022	98,84
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	165.300.000	165.268.710		165.268.710	99,98
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48.984.000	46.688.785	-	46.688.785	95,31
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	512.450.000	486.882.000	25.350	486.856.650	95,01
Belanja Barang Operasional Lainnya	622.685.000	622.464.402	-	622.464.402	99,96
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID 19	-	-	-	-	-
Belanja Bahan	1.548.273.000	1.512.649.702	37.000	1.512.612.702	97,70
Belanja Honor Output Kegiatan	49.600.000	47.600.000	-	47.600.000	95,97
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.648.322.000	9.555.421.157	-	9.555.421.157	99,04
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	963.085.000	950.779.662	-	950.779.662	98,72
Belanja Langganan Telepon	21.000.000	20.466.396	-	20.466.396	97,46
Belanja Sewa	4.924.380.000	4.754.628.124	-	4.754.628.124	96,55
Belanja Jasa Profesi	952.163.000	897.300.000	6.800.000	890.500.000	93,52
Belanja Jasa Lainnya	695.915.000	587.985.783		587.985.783	84,49
Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	38.722.000	20.717.160	-	20.717.160	53,50
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	482.604.000	481.249.792	-	481.249.792	99,72
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.660.015.000	1.621.596.303	-	1.621.596.303	97,69
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.092.000	149.757.500	-	149.757.500	98,47
Belanja Perjalanan Biasa	65.178.179.000	65.078.108.351	987.253.274	64.090.855.077	98,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	815.550.000	727.466.000	10.332.500	717.133.500	87,93
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	991.806.000	772.795.000	7.431.860	765.363.140	77,17
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.654.621.000	15.417.482.253	113.392.042	15.304.090.211	97,76
Jumlah Belanja Barang	106.528.249.000	105.312.520.233	1.134.255.157	104.178.265.076	97,79

Pengembalian belanja barang senilai Rp1.134.255.157,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas, Jasa Profesi, Keperluan kantor, belanja Bahan dan belanja barang operasional satker selama tahun berjalan.

Tabel B.4.2
Akun Signifikan pada Belanja Barang
Per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Persentase dari Total Anggaran (%)	Keterangan
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.648.322.000	9,06	Spanduk, psikotes CPNS/PNS (Jafung), diklat/pelatihan, baju olahraga (Peringatan hari korpri, dirgahayu RI,Harkodia), pencetakan media auditor, publikasi, seminar kit, dan pendukung kegiatan lainnya
524111	Belanja Perjalanan Biasa	65.178.179.000	61,18	temu koordinasi, perjalanan dalam rangka survey, perjalanan dalam rangka koordinasi pengawasan, perjalanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi lingkup Kementerian Pertanian
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.654.621.000	14,70	Perjalanan paket meeting dalam rangka mendukung TUSI Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board/Full Day di Luar Kantor)

Akun signifikan pada belanja barang Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah belanja perjalanan karena tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melakukan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian, sehingga mayoritas kegiatan menggunakan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi senilai Rp 950.779.662,00 berupa pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan obat-obatan untuk poliklinik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Realisasi Belanja Barang (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp104.178.265.076,00 dan Rp71.046.177.215,00.

Tabel B.4.3
Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	Anggaran	Realisasi (Bruto)	%	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)			
Belanja Keperluan Perkantoran	1.402.503.000	1.395.213.153	99,48	1.314.975.000	1.293.893.045	98,40	101.320.108	1,08
Belanja penambah daya Tahan Tubuh	165.300.000	165.268.710	99,98	90.792.000	90.702.500	99,90	74.566.210	0,08
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48.984.000	46.688.785	95,31	61.200.000	59.827.327	97,76	(13.138.542)	(2,44)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	512.450.000	486.882.000	95,01	467.192.000	465.092.000	99,55	21.790.000	(4,54)
Belanja Barang Operasional Lainnya	622.685.000	622.464.402	99,96	161.000.000	146.506.421	91,00	475.957.981	8,97
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID 19	-	-	-	506.089.000	498.527.782	98,51	(498.527.782)	-
Belanja Bahan	1.548.273.000	1.512.649.702	97,70	1.387.093.000	1.380.200.010	99,50	132.449.692	(1,80)
Belanja Honor Output Kegiatan	49.600.000	47.600.000	95,97	157.150.000	156.700.000	99,71	(109.100.000)	(3,75)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.648.322.000	9.555.421.157	99,04	4.710.395.000	4.691.993.667	99,61	4.863.427.490	(0,57)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	963.085.000	950.779.662	98,72	1.346.492.000	1.327.997.535	98,63	(377.217.873)	0,10
Belanja Langganan Telepon	21.000.000	20.466.396	97,46	15.624.000	14.366.553	91,95	6.099.843	5,51
Belanja Sewa	4.924.380.000	4.754.628.124	96,55	1.925.078.000	1.917.661.385	99,61	2.836.966.739	(3,06)
Belanja Jasa Profesi	952.163.000	897.300.000	94,24	729.800.000	720.417.647	98,71	176.882.353	(4,48)
Belanja Jasa Lainnya	695.915.000	587.985.783	84,49	233.994.000	233.971.712	99,99	354.014.071	(15,50)
Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	38.722.000	20.717.160	53,50	590.385.000	543.386.133	92,04	(522.668.973)	(38,54)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	482.604.000	481.249.792	99,72	332.365.000	332.029.645	99,90	149.220.147	(0,18)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.660.015.000	1.621.596.303	97,69	1.915.853.000	1.913.907.424	99,90	(292.311.121)	(2,21)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.092.000	149.757.500	98,47	239.502.000	238.886.750	99,74	(89.129.250)	(1,28)
Belanja Perjalanan Biasa	65.178.179.000	65.078.108.351	99,85	43.202.396.000	43.185.364.217	99,96	21.892.744.134	(0,11)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	815.550.000	727.466.000	89,20	744.600.000	740.690.000	99,47	(13.224.000)	(10,28)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	991.806.000	772.795.000	77,92	76.840.000	76.425.000	99,46	696.370.000	(21,54)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.654.621.000	15.417.482.253	98,49	11.355.352.000	11.318.275.407	99,67	4.099.206.846	(1,19)
Jumlah Belanja Barang (Bruto)	106.528.249.000	105.312.520.233	98,86	71.564.167.000	71.346.822.160	99,70	33.965.698.073	(0,84)
Pengembalian Belanja	0	1.134.255.157	-	-	300.644.945	-	833.610.212	-
Jumlah Belanja Barang (Netto)	106.528.249.000	104.178.265.076	97,79	71.564.167.000	71.046.177.215	99,28	33.132.087.861	(1,48)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp33.132.087.861,00 dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2022. Hal ini karena meningkatnya anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan startegis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Namun secara persentase realisasi belanja barang menurun sebesar 1,48 persen karena ada beberapa realisasi yang dibawah 80 persen seperti pada belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang hanya tercapai sebesar 77,92 persen dan belanja jasa penanganan Pandemi Covid 19 yang hanya tercapai 53,50 persen.

Sampai dengan Semester I tahun 2023 anggaran belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19 masih diadakan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp38.722.000,00. Dan sampai dengan TA.2023 anggaran tersebut terserap senilai Rp20.717.160,00 atau 53,50 persen dari nilai anggaran, untuk biaya test swab dan antigen serta penyemprotan desinfektan pada Gedung B (Itjentan).

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan No.S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 akun khusus Covid-19 semestinya digunakan sampai semester I tahun 2023, sehingga sisa anggaran akun Covid-19 pada Semester II Tahun 2023 direvisi dan pada semester II tahun 2023 penggunaan akun Covid-19 dihentikan.

Belanja Modal
Rp3.504.084.39
6,00

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal (*netto*) adalah Realisasi Belanja Modal pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal (*netto*) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.504.084.396,00 atau 98 persen (pembulatan 98 persen) dari Pagu Anggaran senilai Rp3.580.205.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp999,00.

Tabel B.5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.392.336.000	2.352.285.673	999	2.352.284.674	98,33
Belanja Modal Lainnya	949.190.000	922.790.281	-	922.790.281	97,22
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	238.679.000	229.009.441	-	229.009.441	95,95
Jumlah Belanja Modal	3.580.205.000	3.504.085.395	999	3.504.084.396	97,87

Realisasi Belanja Modal (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.504.084.396,00 dan Rp2.067.440.320,00.

Tabel B.5.2
Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.392.336.000	2.352.285.673	98,33	2.316.991.000	2.107.300.200	90,95	244.985.473
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-		90.909.000	90.909.000	100,00	(90.909.000)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	949.190.000	922.790.281	97,22	402.982.000	402.972.861	100,00	519.817.420	(2,78)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	238.679.000	229.009.441	95,95	189.118.000	189.110.423	100,00	39.899.018	(4,05)
Jumlah Belanja Modal (Bruto)	3.580.205.000	3.504.085.395	97,87	3.000.000.000	2.790.292.484	93,01	713.792.911	4,86
Pengembalian Belanja	-	999	-	-	-	-	999	-
Jumlah Belanja Modal (Netto)	3.580.205.000	3.504.084.396	97,87	3.000.000.000	2.790.292.484	93,01	713.791.912	4,86

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp713.791.912,00 atau 4,86 persen dibandingkan realisasi belanja modal per 31 Desember 2022, karena peningkatan kebutuhan Belanja Modal untuk menunjang kegiatan operasional kantor.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp2.352.284.674,00

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*netto*) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.352.284.674,00 atau sebesar 98,33 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp2.392.336.000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.352.284.674,00 dan Rp2.107.300.200,00 .

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin jika dibandingkan per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.1.1
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.392.336.000	2.352.285.673	98,33	2.316.991.000	2.107.300.200	90,95	244.985.473	7,38
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Bruto)	2.392.336.000	2.352.285.673	98,33	2.316.991.000	2.107.300.200	90,95	244.985.473	7,38
Pengembalian Belanja	-	999	-	-	-	-	999	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto)	2.392.336.000	2.352.284.674	98,33	2.316.991.000	2.107.300.200	90,95	244.984.474	7,38

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan senilai Rp244.984.474,00 atau 7,38 persen karena peningkatan kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin.

Pengembalian belanja senilai Rp999,00 setoran pengembalian belanja ke Kas Negara karena kelebihan pencatatan pada modul komitmen terhadap pengadaan 1 (satu) unit tas koper (untuk kebutuhan poliklinik) yang seharusnya tercatat senilai Rp1.999.000,00 namun diinput senilai Rp1.999.999,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp9.999,00.

(Rincian Belanja Modalnya Peralatan dan Mesin terlampir pada Lampiran Pendukung B.7).

Belanja
Penambahan
Nilai Peralatan
dan Mesin
Rp0,00

B.5.2. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*netto*) adalah Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.

Pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja penambahan nilai peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp90.909.000,00.

Belanja Modal
Lainnya
Rp922.790.281,
00

B.5.3. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*netto*) per 30 September 2023 adalah Rp922.790.281,00 atau 97,22 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp949.190.000,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp922.790.281,00 dan Rp402.972.861,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya jika dibandingkan per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel B.5.3.1
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Lainnya	949.190.000	922.790.281	97,22	402.982.000	402.972.861	100,00	519.817.420
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Bruto)	949.190.000	922.790.281	97,22	402.982.000	402.972.861	100,00	519.817.420	(2,78)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Netto)	949.190.000	922.790.281	97,22	402.982.000	402.972.861	100,00	519.817.420	(2,78)

Pada tahun 2023 realisasi belanja modal lainnya meningkat senilai Rp519.817.420,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada unit Sekretariat Itjentan sehingga terjadi perpindahan dan renovasi struktur ruangan antar bagian pada unit Sekretariat itjentan.

Namun secara persentase menurun sebesar 2,78 persen karena efisiensi realisasi pengadaan belanja modal, tapi output tercapai 100 persen.

Pengadaan belanja modal lainnya senilai Rp922.790.281,00 merupakan pengadaan renovasi Gedung B atau Aset Tetap Renovasi (ATR) yaitu sebagai berikut:

1. Renovasi lantai 2, yaitu renovasi dinding dan lantai ruang kerja Irjen, renovasi dinding dan lantai ruang kerja TU Irjen, renovasi kamar mandi dan ruang istirahat Irjen dan penataan ruang kerja lantai 2 (Ruang Kelompok KBMN, Ruang Kelompok Hukum dan Humas, Ruang Bagian Umum) dengan total realisasi belanja modal senilai Rp643.035.281,00.
2. Renovasi lantai 4, yaitu renovasi lantai ruang kerja Inspektur Investigasi dan penataan ruang kerja lantai 4 (Ruang Kelompok Perencanaan dan Ruang Kelompok PHPEP) senilai Rp201.543.000,00.
3. Penataan ruang rapat lantai 6 senilai Rp78.212.000,00.
(Rincian Belanja Modal Lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.7).

Belanja
Penambahan
Nilai Aset Tetap
Lainnya
Rp299.009.441,
00

B.5.4. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*netto*) adalah Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp299.009.441,00 atau 95,95 persen dari anggaran senilai Rp238.679.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.4.1
Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31-Dec-23			31-Dec-22			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	238.679.000	229.009.441	95,95	189.118.000	189.110.423	100,00	39.899.018
Jumlah Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (Bruto)	238.679.000	229.009.441	95,95	189.118.000	189.110.423	100,00	39.899.018	(4,05)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (Netto)	238.679.000	229.009.441	95,95	189.118.000	189.110.423	100,00	39.899.018	(4,05)

Pada tahun 2023 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya meningkat senilai Rp39.899.018,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, karena peningkatan kebutuhan pengembangan sistem aplikasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, namun secara persentase menurun sebesar 4,05 persen karena efisiensi pengadaan belanja modal.

Pengadaan belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp299.009.441,00 merupakan pengembangan pada aplikasi yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa:

1. E-Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (E-TLHP) pada aplikasi SIMWAS senilai Rp78.920.149,00.
2. Modul Pelaporan (E-Library) pada aplikasi SIMWAS senilai Rp56.456.450,00.
3. E-Inventory pada aplikasi SIMWAS senilai Rp43.707.842,00.
4. Pengembangan Wistleblower's System (WBS) pada Website Itjen senilai Rp 49.925.000,00.

(Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.8).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp450.740.079,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp450.740.079,00 dan Rp592.924.235,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut .

Tabel C.1
Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Bukan Pajak	14.541.856	50.700.000
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	-	(253.500)
3	Piutang Bukan Pajak (Netto)	14.541.856	50.446.500
4	Persediaan	436.198.223	542.477.735
Jumlah		450.740.079	592.924.235

Piutang
Bukan Pajak
Rp14.541.856,00

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan Hak /pengakuan pemerintah atas uang atau jasa dari entitas lain terhadap pelayanan yang telah diberikan pemerintah baru dipotong atau disetorkan ke Kas Negara tahun berikutnya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp14.541.856,00 dan Rp50.700.000,00.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 merupakan sisa perjalanan dinas tahun 2023 yang baru diterima dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Tahun 2024 senilai

Rp14.016.706,00 (bukti setoran terlampir) dan kelebihan pembayaran uang makan PNS senilai Rp525.150,00 yang akan disetor ditahun 2024. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp50.700.000,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional Auditor, sesuai dengan LHP Nomor R- 205/PW.130/G.5/07/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Piutang tersebut seluruhnya telah dilunasi pada tanggal 12 Januari 2023 sehingga saldo piutang per 30 September 2023 sudah nihil. (Rincian dan Bukti Setor terlampir pada C.8).

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing–masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp253.500,00.

Terhadap Piutang Bukan Pajak Tahun 2023 senilai Rp14.016.706,00 tidak dilakukan penyisihan piutang karena piutang sudah dibayarkan di bulan Januari 2024 sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan dan Piutang tahun 2022 senilai Rp50.700.000,00 telah dilunasi seluruhnya, maka dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagihnya adalah nihil.

Piutang
Bukan Pajak
(Netto)
Rp14.541.8
56,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak (*netto*) adalah selisih saldo Piutang Bukan Pajak dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak.

Saldo Piutang Bukan Pajak (*netto*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp14.541.856,00 dan Rp50.446.500,00.

Persediaan
Rp436.198.
223,00

C.1.4. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp436.198.223,00 dan Rp542.477.735,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel C.1.5.1
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Barang Konsumsi	Rp 435.592.223	Rp 541.957.735	Rp (106.365.512)	(19,63)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 606.000	Rp 520.000	Rp 86.000	16,54
	Jumlah	Rp 436.198.223	Rp 542.477.735	Rp (106.279.512)	(19,59)

Saldo Persediaan 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp106.279.512,00 jika dibandingkan dengan persediaan tahun 2022 karena meningkatnya kebutuhan barang persediaan.

Rekapan Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel C.1.5.2
Perhitungan Mutasi Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2022		542.477.735
Mutasi Tambah		950.779.662
Pembelian		
- Pembelian 5218	950.779.662	
Total pembelian	950.779.662	
Mutasi Kurang		(1.057.059.174)
Pemakaian		
- Beban Persediaan Konsumsi	(1.052.459.074)	
- Beban Persediaan untuk pemeliharaan	(2.144.000)	
- Beban Persediaan Lainnya	(2.456.100)	
Total Pemakaian	(1.057.059.174)	
Saldo Persediaan per 31 Desember 2023		436.198.223

Aset Tetap
Rp7.860.839.145,00

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap (*netto* setelah Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp7.860.839.145,00 dan Rp10.208.689.595,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.1
Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	Rp 41.739.519.608	Rp 40.144.672.434	Rp 1.594.847.174	3,97
2	Gedung dan Bangunan	Rp 329.071.000	Rp 329.071.000	Rp -	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 164.500.000	Rp 164.500.000	Rp -	-
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 107.231.970	Rp 107.231.970	Rp -	-
	Jumlah	Rp 42.340.322.578	Rp 40.745.475.404	Rp 1.594.847.174	3,91
	Akum. Penyusutan	Rp (34.479.483.433)	Rp (30.536.785.809)	Rp (3.942.697.624)	12,91
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 7.860.839.145	Rp 10.208.689.595	Rp (2.347.850.450)	(23,00)

Peralatan
 dan Mesin
 Rp41.739.519.608,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp41.739.519.608,00 dan Rp40.144.672.434,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.2.1.1
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	40.144.672.434,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	Rp	2.352.285.673,00
- Transfer Masuk	Rp	37.500.000,00
Mutasi Tambah	Rp	2.389.785.673,00
Mutasi Keluar :		
- Reklas ke Aset Lainnya	Rp	277.090.500,00
- Transfer keluar	Rp	517.847.000,00
- Koreksi nilai aset	Rp	999,00
Mutasi Kurang	Rp	794.938.499,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	41.739.519.608,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Rp	(34.325.217.498,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	7.414.302.110,00

Mutasi Tambah senilai Rp2.389.785.673,00 adalah sebagai berikut:

- Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp2.352.285.673,00 (Rincian dapat dilihat di Lampiran Pendukung “Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin”).

- b. Transfer Masuk berupa 1 unit AC Split dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp37.500.000, dengan Nomor BAST. B.2370/PL.210/C.1/07/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Mutasi Kurang senilai Rp794.938.499,00 adalah sebagai berikut:

- a. Reklas keluar senilai Rp277.090.500,00 dari akun peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah) karena penghentian aset tetap dari Operasional Pemerintah sebanyak 2 (dua) unit berupa kendaraan roda 4 dengan Surat Keterangan Henti Guna Nomor.2698/KU.230/H.1.1 /07/2023 tanggal 24 Juli 2023. Pada tanggal 18 Desember 2023 dilakukan proses lelang di KPKNL dengan Risalah Lelang Nomor 1269/26/2023 dan pada tanggal 21 Desember 2023 pendapatan lelang tersebut senilai Rp86.781.989,00 telah disetorkan ke Kas Negara dengan Nomor NTPN 886460N9VRR94RQE, terlampir.
- b. Transfer keluar senilai Rp517.847.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Transfer keluar berupa 1 unit *Telephone Mobile* senilai Rp9.974.000,00 dengan Nomor BAST-B.2894/PL.300/G.1/08 /2023 tanggal 3 Agustus 2023 ke Biro Keuangan dan BMN
 - 2) Transfer keluar 1 unit *Lap Top* senilai Rp31.133.000 dengan Nomor. BAST-B.2894/PL.300/G.1/08 /2023 tanggal 3 Agustus 2023 ke Biro Keuangan dan BMN.
 - 3) Transfer keluar 22 unit peralatan *Mainframe* lainnya (RAM) Merk *Dell Memory Update-32-GB-2RX4 RDIMM* senilai Rp476.740.000,00 dengan BAST Nomor BAST-B.4426/PL.300/G.1/12/2023 tanggal 11

Desember 2023 Ke Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

- c. Koreksi pencatatan karena kelebihan pencatatan pada Peralatan dan mesin berupa 1 unit Koper/Tas senilai Rp999 dengan surat Keterangan Sekretaris Itjen No.3374/PL.300/G.1/09/20203 tanggal 25 September 2023.

Nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 Rp7.414.302.110,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp34.325.217.498,00 sesuai dengan nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 pada tabel Penyusutan Aset Tetap.

Gedung dan
Bangunan
Rp329.071.
000,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp329.071.000,00 dan Rp329.071.000,00. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Bangunan gudang tertutup permanen milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Gedung dan Bangunan telah dilakukan Revaluasi pada Tahun 2019, sesuai dengan Laporan Hasil IP No. LHIP-72/REV/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 27 November 2019 dan dicatat pada aplikasi SIMAK BMN. Rincian Hasil Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.2.1

Rincian Revaluasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebelum Revaluasi	379,263,000
Nilai Koreksi BMN	(50,192,000)
Saldo Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi	329,071,000

Pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

Nilai buku gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp283.561.185,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp45.509.815,00 sesuai dengan nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 tabel Penyusutan Aset Tetap.

Jalan, Irigasi
dan
Jaringan
Rp164.500.
000,00

C.2.3. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dapat diukur secara handal.

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp164.500.000,00 dan Rp164.500.000,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan transfer masuk berupa jaringan dan instalasi untuk ruang *Agriculture War Room* (AWR) Itjentan senilai Rp164.500.000,00 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp110.600.000,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp53.900.000,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 tabel Penyusutan Aset Tetap.

Aset Tetap
Lainnya
Rp107.231.
970,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp107.231.970,00 dan Rp107.231.970,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel C.2.4.1
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Tetap Lainnya	107.231.970	107.231.970
	Jumlah	107.231.970	107.231.970

Mutasi nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.2.4.2
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	107.231.970,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal lainnya (ATR)	Rp	922.790.281,00
Mutasi Tambah	Rp	922.790.281,00
Mutasi Kurang		
- Transfer keluar	Rp	922.790.281,00
Mutasi Kurang	Rp	922.790.281,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	107.231.970,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Rp	(54.856.120,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	52.375.850,00

Mutasi tambah merupakan pengadaan Renovasi Gedung B (Aset Tetap dalam Renovasi) senilai Rp922.790.281,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan renovasi dinding ruangan eselon I senilai Rp197.860.000,00.
- b. Pekerjaan renovasi lantai ruang Inspektur Investigasi senilai Rp197.994.250,00.

- c. Pekerjaan renovasi lantai ruang Eselon I senilai Rp29.779.918,00.
- d. Pekerjaan renovasi dinding ruang Tata Usaha Eselon I sebesar Rp 45.222.500,00.
- e. Pekerjaan renovasi lantai ruang Tata Usaha Eselon I sebesar Rp 118.970.000,00.
- f. Pekerjaan renovasi kamar mandi dan ruang istirahat Irjen senilai Rp109.333.613,00.
- g. Pekerjaan Penataan Ruang Rapat Lantai 6 senilai Rp78.212.000,00.
- h. Pekerjaan Penataan Ruang Kerja Lantai 2 senilai Rp62.845.000,00.
- i. Pekerjaan Penataan Ruang Kerja Lantai 4 senilai Rp82.573.000,00.

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran Pendukung C.8.Pengadaan Belanja Modal Lainnya).

Dan mutasi kurang senilai Rp922.790.281,00 merupakan transfer keluar Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) gedung dan bangunan yang ditransfer keluar ke Biro Umum dan Pengadaan Setjen dengan rincian Nomor BAST.2896/PL.300/G.1/8/2023 tanggal 3 Agustus 2023 senilai Rp589.826.668,00 dan Nomor BAST.4393/PL.300/G.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 senilai Rp332.963.613,00.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp52.375.850,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp54.856.120,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 tabel Penyusutan Aset Tetap.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp34.479.4
83.433,00

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp34.479.483.433,00 dan Rp30.536.785.809,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel C.2.5
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akml. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	41.739.519.608	34.325.217.498	7.414.302.110
2	Gedung dan Bangunan	329.071.000	45.509.815	283.561.185
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.500.000	53.900.000	110.600.000
4	Aset Tetap Lainnya	107.231.970	54.856.120	52.375.850
	Jumlah	42.340.322.578	34.479.483.433	7.860.839.145

(Nilai akumulasi penyusutan aset tetap telah sesuai dengan Tabel Penyusutan per 31 Desember 2023).

Aset
Lainnya
Rp194.743.
082,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Nilai Aset Lainnya (*netto* setelah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp194.743.082,00 dan Rp308.012.135,00.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	3.386.471.969	3.157.462.528	229.009.441
3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(3.191.728.887)	(2.849.450.393)	(342.278.494)
Nilai Buku Aset Lainnya		194.743.082	308.012.135	(113.269.053)

Aset Tak
Berwujud
Rp3.386.
471.969,0
0

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.386.471.969,00 dan Rp3.157.462.528,00.

Tabel C.3.1.1
Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Tak Berwujud	3.386.471.969	3.157.462.528
Jumlah		3.386.471.969	3.157.462.528

Mutasi nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.3.1.2
Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.157.462.528,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal lainnya (software)	Rp	229.009.441,00
Mutasi Tambah	Rp	229.009.441,00
Mutasi Kurang	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	3.386.471.969,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Rp	(3.191.728.887,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	194.743.082,00

Mutasi tambah senilai Rp229.009.441,00 merupakan pengadaan belanja modal lainnya (software) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembangan Software aplikasi SIMWAS yaitu pengembangan aplikasi E-Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) senilai Rp78.920.149,00.
- b. Pengembangan Software aplikasi SIMWAS yaitu Modul e-Library senilai Rp56.456.450,00.
- c. Pengembangan Software aplikasi SIMWAS yaitu Modul E-Inventory senilai Rp43.707.842,00.
- d. Pengembangan Software aplikasi SIMWAS yaitu Software knowledge manajemen (Website Itjen) senilai Rp49.925.000,00.

(Rincian Aset tak berwujud terdapat pada lampiran).

Nilai buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp194.743.082,00 setelah dikurangi nilai akumulasi amortisasi software senilai Rp3.191.728.887,00 sesuai dengan nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2023 tabel Penyusutan Aset Lainnya.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp3.191.728.887,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.191.728.887,00 dan Rp2.849.450.393,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel C.3.3.1
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	3.386.471.969	(3.191.728.887)	194.743.082
Total	3.386.471.969	(3.191.728.887)	194.743.082

(Nilai akumulasi Amortisasi Aset Lainnya telah sesuai dengan Tabel Penyusutan per 31 Desember 2023).

Kewajiban
 Jangka
 Pendek
 Rp27.651.7
 91,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp27.651.791,00 dan Rp70.503.283,00

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel C.4.1
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 27.651.791	Rp 70.503.283
Jumlah	Rp 27.651.791	Rp 70.503.283

Utang
 Kepada
 Pihak
 Ketiga
 Rp27.651
 .791,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp27.651.791,00 dan Rp70.503.283,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel C.4.1.1
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	26.939.400	69.842.300	(42.902.900)
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	712.391	660.983	51.408
	Utang Kepada Pihak Ketiga	27.651.791	70.503.283	(42.851.492)

C.4.1.1 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar adalah perolehan jasa kepada pegawai yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp26.939.400,00 dan Rp69.842.300,00.

Rincian mutasi belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 senilai Rp26.939.400,00 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1.2
Rincian Mutasi Belanja Pegawai Yang
Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian	31-Dec-22	Pelunasan Utang		Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2023	31-Dec-23	Keterangan
				Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7=4-5+6	8	
01	511111	Gaji Pokok PNS	525.375	525.375	1.922.490	1.922.490	Pelunasan Utang Gaji PNS tahun 2022 dan Utang Gaji PNS Tahun 2023	
02	511119	Pembulatan Gaji PNS	(9)	(9)	(294)	294	Pelunasan Utang Gaji Pegawai (pembulatan) tahun 2022 dan Utang Gaji PNS Tahun 2023	
03	511121	Tunj. Suami/Istri PNS	57.810	57.810	211.170	211.170	Pelunasan Utang Tunjangan Suami/Istri Pegawai tahun 2022 dan Utang Tunjangan	
04	511122	Tunj. Anak PNS	23.124	23.124	42.234	42.234	Pelunasan Utang Tunjangan Anak Pegawai tahun 2022 dan Utang Tunjangan Anak PNS Tahun	
05	511124	Tunj. Fungsional PNS	1.420.000	1.420.000	6.926.000	6.926.000	Pelunasan Utang Tunjangan Fungsional Pegawai tahun 2022 dan Tunjangan Fungsional	
06	511129	Uang Makan PNS	67.816.000	67.816.000	14.364.000	14.364.000	Pelunasan Utang uang makan 2022 dan Utang Uang Makan Tahun 2023	
07	511611	Gaji Pokok PPPK	-	-	2.578.848	2.578.848	Utang Gaji Pokok PPPK Tahun 2023	
08	511619	Pembulatan Gaji PPPK	-	-	28	28	Utang Pembulatan Gaji Pokok PPPK Tahun 2023	
09	511621	Tunj. Suami/Istri PPPK	-	-	264.720	264.720	Utang Tunjangan Suami/Istri PPPK Tahun 2023	
10	511622	Tunj. Anak PPPK	-	-	52.944	52.944	Utang Tunjangan Anak PPPK Tahun 2023	
11	511624	Tunj. Fungsional PPPK	-	-	360.000	360.000	Utang Tunjangan Fungsional PPPK Tahun 2023	
12	511625	Tunj. Beras PPPK	-	-	217.260	217.260	Utang Tunjangan Beras PPPK Tahun 2023	
			69.842.300	69.842.300	26.939.400	26.939.400		

Belanja Pegawai Yang masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 adalah kekurangan pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan tahun 2022 senilai Rp69.842.300. Pada Tahun 2023 seluruh utang pegawai tahun 2022 telah dibayarkan melalui SPM Gaji sehingga mengurangi nilai Belanja Pegawai. Pada tahun 2023 belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp26.939.400,00 yang merupakan kekurangan pembayaran gaji PNS, Gaji PPPK, tunjangan-tunjangan dan uang makan PNS tahun 2023 dan akan dibayarkan kepada pegawai tahun 2024.

(Rincian mutasi belanja pegawai yang masih harus dibayar dan bukti setornya dapat dilihat pada lampiran pendukung).

C.4.1.2 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar adalah perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp712.391,00 dan Rp660.983,00.

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 senilai Rp660.983,00 berupa Tagihan pemakaian telephone bulan Desember 2022 telah dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2023 sehingga Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar tahun 2022 telah lunas dan pada tahun 2023 terdapat penambahan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar senilai Rp712.391,00 yang merupakan Tagihan pemakaian telephone bulan Desember 2023, sehingga Belanja

Barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp712.391,00. Tagihan tersebut telah dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2024. (Rincian mutasi belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan bukti setornya dapat dilihat pada lampiran pendukung).

Ekuitas
Rp8.478.670
.515,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp8.478.670.515,00 dan Rp11.039.122.682,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan pada periode sebelumnya.

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO per 30 September 2023 sebagai berikut.

Tabel D.1
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pada LO dan LRA per 31 Desember 2023

Uraian	LO	LRA	Selisih	Referensi
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	4.518.018	4.518.018	-	-
Pendapatan Pelepasan aset Non Lancar	86.781.989	86.781.989	-	-
Pendapatan Non Operasional Lainnya	6.650.000	57.350.000	- 50.700.000	D.9.3.1.2
Jumlah	97.950.007	148.650.007	- 50.700.000	

PNBP
Rp4.518.018,00

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk kegiatan Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing masing adalah Rp4.518.018,00 dan Rp0,00. PNBP lainnya pada tahun 2023 merupakan pendapatan denda keterlambatan kerja berupa pengadaan laptop tahun 2023.

Beban Pegawai
Rp20.039.633.66
1,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.039.633.661,00 dan Rp21.148.015.062,00. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.2.1
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	14.469.327.835	14.973.564.922	(504.237.087)	(3,37)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	216.487	214.417	2.070	0,97
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.018.844.952	1.071.761.670	(52.916.718)	(4,94)
Belanja Tunjangan anak PNS	302.593.306	310.027.404	(7.434.098)	(2,40)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	232.050.000	252.949.740	(20.899.740)	(8,26)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.251.638.000	2.291.689.000	(40.051.000)	(1,75)
Belanja Tunjangan PPh PNS	125.431.057	126.852.339	(1.421.282)	(1,12)
Belanja Tunjangan Beras PNS	760.699.680	794.881.920	(34.182.240)	(4,30)
Belanja Uang Makan PNS	690.687.850	1.119.154.700	(428.466.850)	(38,28)
Belanja Tunjangan Umum PNS	166.239.850	202.679.950	(36.440.100)	(17,98)
Beban Gaji Pokok PPPK	14.444.848	-	14.444.848	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	192	-	192	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	264.720	-	264.720	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	52.944	-	52.944	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000	-	2.520.000	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	506.940	-	506.940	-
Beban Uang Makan PPPK	962.000	-	962.000	-
Belanja Uang Lembur	3.153.000	4.239.000	(1.086.000)	(25,62)
Jumlah	20.039.633.661	21.148.015.062	(1.108.381.401)	(5,24)

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.108.381.401,00 atau 5,24% dibandingkan beban pegawai per 31 Desember 2022. Penurunan karena pengurangan pegawai yang pensiun.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.2.2
Realisasi Beban dan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Pegawai		
	Perkiraan		LO	LRA	Selisih
01	511111	Beban/Belanja Gaji Pokok PNS	14.469.327.835	14.467.930.720	1.397.115
02	511119	Beban/Belanja Pembulatan Gaji PNS	216.487	216.772	(285)
03	511121	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.018.844.952	1.018.691.592	153.360
04	511122	Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	302.593.306	302.574.196	19.110
05	511123	Beban/Belanja Tunj.Struktural PNS	232.050.000	232.050.000	-
06	511124	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.251.638.000	2.246.132.000	5.506.000
07	511125	Beban/Belanja Tunj.PPh PNS	125.431.057	125.431.057	-
08	511126	Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	760.699.680	760.699.680	-
09	511129	Beban/Belanja Uang Makan PNS	690.687.850	744.665.000	(53.977.150)
10	511151	Beban/Belanja Tunjangan Umum PNS	166.239.850	166.239.850	-
11	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	14.444.848	11.866.000	2.578.848
12	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	192	164	28
13	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	264.720	-	264.720
14	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52.944	-	52.944
15	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000	2.160.000	360.000
16	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	506.940	289.680	217.260
17	511628	Beban Uang Makan PPPK	962.000	962.000	-
18	512211	Belanja Uang Lembur	3.153.000	3.153.000	-
			20.039.633.661	20.083.061.711	(43.428.050)

Realisasi Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp20.039.633.661,00 dan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp20.083.061.711,00 sehingga terdapat selisih lebih kecil pada Laporan Operasional senilai Rp43.428.050,00, karena adanya pelunasan utang kepada pegawai Tahun Anggaran 2022 senilai Rp69.842.300,00 dan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 senilai

Rp26.939.400,00 (rincian pelunasan utang kepada pihak ketiga terlampir pada Lampiran C.8), serta kelebihan uang makan PNS tahun 2023 senilai Rp525.150,00 yang menjadi piutang tahun 2023 dan akan dilunasi tahun 2024. Rincian penjelasan selisih Realisasi Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) adalah sebagai berikut:

Tabel D.2.3
Rincian Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023

No	Kode Perkiraan	Uraian	LRA 31 Desember 2023	Pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022	Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar per 30 Juni 2023	Kelebihan uang makan PNS Tahun 2023	LO 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=4-5+6-7
01	511111	Beban/Belanja Gaji Pokok PNS	14.467.930.720	525.375	1.922.490	-	14.469.327.835
02	511119	Beban/Belanja Pembulatan Gaji PNS	216.772	(9)	(294)	-	216.487
03	511121	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.018.691.592	57.810	211.170	-	1.018.844.952
04	511122	Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	302.574.196	23.124	42.234	-	302.593.306
05	511123	Beban/Belanja Tunj. Struktural	232.050.000	-	-	-	232.050.000
06	511124	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.246.132.000	1.420.000	6.926.000	-	2.251.638.000
07	511125	Beban/Belanja Tunj. PPh PNS	125.431.057	-	-	-	125.431.057
08	511126	Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	760.699.680	-	-	-	760.699.680
09	511129	Beban/Belanja Uang Makan PNS	744.665.000	67.816.000	14.364.000	525.150	690.687.850
10	511151	Beban/Belanja Tunjangan Umum PNS	166.239.850	-	-	-	166.239.850
11	511611	Beban/Belanja Gaji Pokok PPPK	11.866.000	-	2.578.848	-	14.444.848
12	511619	Beban/Belanja Pembulatan Gaji PPPK	164	-	28	-	192
13	511621	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	-	-	264.720	-	264.720
14	511622	Beban/Belanja Tunj. Anak PPPK	-	-	52.944	-	52.944
15	511624	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PPPK	2.160.000	-	360.000	-	2.520.000
16	511625	Beban/Belanja Tunj. Beras PPPK	289.680	-	217.260	-	506.940
17	511628	Beban/Belanja Uang Makan PPPK	962.000	-	-	-	962.000
11	512211	Belanja Uang Lembur	3.153.000	-	-	-	3.153.000
			20.083.061.711	69.842.300	26.939.400	525.150	20.039.633.661

Beban

Persediaan

Rp1.054.915.17

4,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.054.915.174,00 dan Rp1.404.407.474,00.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3.1
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.052.459.074	1.404.407.474	(351.948.400)	(25,06)
Beban Persediaan Lainnya	2.456.100	-	2.456.100	-
Jumlah Beban Persediaan	1.054.915.174	1.404.407.474	(349.492.300)	(24,89)

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan senilai Rp.349.492.300,00 atau 24,89% jika dibandingkan dengan beban persediaan per 31 Desember 2022 karena efisiensi pengeluaran (ATK) pada Inspektorat Jenderal Kementan. (Rincian Mutasi Persediaan jika dibandingkan dengan Beban persediaan dapat dilihat pada Lampiran Pendukung)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp20.097.491.2
99,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan/ atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lainnya berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.097.491.299,00 dan Rp12.211.883.003,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4.1
Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.386.230.022	1.293.893.045	92.336.977	7,14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	165.268.710	90.702.500	74.566.210	82,21
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	46.688.785	59.827.327	(13.138.542)	(21,96)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	486.856.650	465.092.000	21.764.650	4,68
Beban Barang Operasional Lainnya	622.464.402	146.506.421	475.957.981	324,87
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID	-	498.527.782	(498.527.782)	(100,00)
Beban Bahan	1.512.612.702	1.380.200.010	132.412.692	9,59
Beban Honor Output Kegiatan	47.600.000	155.710.000	(108.110.000)	(69,43)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.555.421.157	4.691.993.667	4.863.427.490	103,65
Beban Langganaan Telepon	20.517.804	14.193.374	6.324.430	44,56
Beban Sewa	4.754.628.124	1.917.661.385	2.836.966.739	147,94
Beban Jasa Profesi	890.500.000	720.217.647	170.282.353	23,64
Beban Jasa Lainnya	587.985.783	233.971.712	354.014.071	151,31
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	20.717.160	543.386.133	(522.668.973)	(96,19)
JUMLAH	20.097.491.299	12.211.883.003	7.885.608.296	64,57

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan senilai Rp7.885.608.296,00 atau 64,57% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022 karena meningkatnya anggaran belanja barang dan jasa tahun 2023 untuk kegiatan startegis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, namun terdapat penurunan yang signifikan pada beban jasa penanganan Pandemi Covid-19 karena dengan adanya surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan No.S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa akun khusus Covid-19 digunakan sampai dengan semester I tahun 2023, sehingga pada Semester II Tahun 2023 sisa anggaran

akun Covid-19 harus direvisi. Rincian Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
			LO	LRA	Selisih
01	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.386.230.022	1.386.230.022	-
02	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	165.268.710	165.268.710	-
03	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	46.688.785	46.688.785	-
04	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	486.856.650	486.856.650	-
05	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	622.464.402	622.464.402	-
06	521211	Beban Bahan	1.512.612.702	1.512.612.702	-
07	521213	Beban Honor Output Kegiatan	47.600.000	47.600.000	-
08	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.555.421.157	9.555.421.157	-
09	522112	Beban Langganaan Telepon	20.517.804	20.466.396	51.408
10	522141	Beban Sewa	4.754.628.124	4.754.628.124	-
11	522151	Beban Jasa Profesi	890.500.000	890.500.000	-
12	522191	Beban Jasa Lainnya	587.985.783	587.985.783	-
13	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	20.717.160	20.717.160	-
			20.097.491.299	20.097.439.891	51.408

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp20.097.491.299,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp20.097.439.891,00 sehingga terdapat selisih lebih besar pada Laporan Operasional senilai Rp51.408,00.

Selisih nilai Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) dan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp51.408,00 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel D.4.3
Rincian Selisih Realisasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023

No	Kode Perkiraan	Uraian	LRA 31 Desember 2023	Pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	LO 31 Desember 2023
01	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.386.230.022	-	-	1.386.230.022
02	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	165.268.710	-	-	165.268.710
03	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	46.688.785	-	-	46.688.785
04	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	486.856.650	-	-	486.856.650
05	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	622.464.402	-	-	622.464.402
06	521211	Beban Bahan	1.512.612.702	-	-	1.512.612.702
07	521213	Beban Honor Output Kegiatan	47.600.000	-	-	47.600.000
08	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.555.421.157	-	-	9.555.421.157
09	522112	Beban Langganan Telepon	20.466.396	660.983	712.391	20.517.804
10	522141	Beban Sewa	4.754.628.124	-	-	4.754.628.124
11	522151	Beban Jasa Profesi	890.500.000	-	-	890.500.000
12	522191	Beban Jasa Lainnya	587.985.783	-	-	587.985.783
13	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	20.717.160	-	-	20.717.160
			20.097.439.891	660.983	712.391	20.097.491.299

1. Pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2022 senilai Rp660.983,00 yang seharusnya dibebankan pada periode pelaporan tahun 2022 namun baru direalisasikan tanggal 20 Januari 2023, sehingga mengurangi nilai beban langganan telepon tahun 2023.

2. Pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2023 senilai Rp712.391,00 yang belum dibebankan pada periode pelaporan pelaporan, dan disetorkan tanggal 18 Januari 2024, sehingga menambah nilai beban langganan telepon tahun 2023 (Rincian Mutasi Utang per 31 Desember 2023 terdapat pada lampiran pendukung).

Beban
Pemeliharaan
Rp2.254.747.59
5,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.254.747.595,00 dan Rp2.485.303.819,00.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5.1
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	481.249.792	332.029.645	149.220.147	44,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.621.596.303	1.913.907.424	(292.311.121)	(15,27)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.757.500	238.886.750	(89.129.250)	(37,31)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.144.000	480.000	1.664.000	346,67
Jumlah	2.254.747.595	2.485.303.819	(230.556.224)	(9,28)

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp230.556.224,00 atau 9,28% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022, karena adanya efisiensi pemakaian belanja pemeliharaan.

Rincian Perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
	Perkiraan		LO	LRA	Selisih
01	523111	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	481.249.792	481.249.792	-
02	523121	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.621.596.303	1.621.596.303	-
03	523129	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.757.500	149.757.500	-
04	593113	Beban/Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.144.000	-	2.144.000
			2.254.747.595	2.252.603.595	2.144.000

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp2.254.747.595,00 dan realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp2.252.603.595,00 sehingga terdapat selisih lebih besar pada Laporan Operasional senilai Rp2.144.000,00, karena adanya pemakaian barang habis pakai berupa persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp2.144.000,00 yang merupakan akun persediaan dan realisasi belanjanya menggunakan belanja persediaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
 Perjalanan
 Dinas
 Rp80.863.425.2
 22,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.863.425.222,00 dan Rp55.021.299.679,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6.1
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	64.076.838.371	42.981.321.781	21.095.516.590	49,08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	717.133.500	731.525.000	(14.391.500)	(1,97)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	765.363.140	73.825.000	691.538.140	936,73
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.304.090.211	11.234.627.898	4.069.462.313	36,22
Jumlah	80.863.425.222	55.021.299.679	25.842.125.543	46,97

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp25.842.125.543,00 atau 46,97% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022. Peningkatan beban realisasi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2023 karena meningkatnya anggaran belanja perjalanan dinas pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan startegis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6.2.
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas		
			LO	LRA	Selisih
01	524111	Beban/Belanja Perjalanan Biasa	64.076.838.371	64.090.855.077	(14.016.706)
02	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	717.133.500	717.133.500	-
03	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	765.363.140	765.363.140	-
04	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.304.090.211	15.304.090.211	-
			80.863.425.222	80.877.441.928	(14.016.706)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp80.863.425.222,00 dan realisasi Belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp80.877.441.928,00 sehingga terdapat selisih lebih kecil pada Laporan Operasional senilai

Rp14.016.706,00. Selisih nilai Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp14.016.706,00 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel D.6.3
Rincian Selisih Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023

No	Kode Perkiraan	Uraian	LRA 31 Desember 2023	Sisa Perjalanan Dinas Tahun 2023 yang dipertanggungjawabkan tahun 2024 (piutang lainnya)	LO 31 Desember 2023
01	524111	Beban/Belanja Perjalanan Biasa	64.090.855.077	14.016.706	64.076.838.371
02	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	717.133.500	-	717.133.500
03	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	765.363.140	-	765.363.140
04	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.304.090.211	-	15.304.090.211
			80.877.441.928	14.016.706	80.863.425.222

Pada tanggal pelaporan masih terdapat sisa perjalanan dinas tahun 2023 yang baru diterima dan disetor oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024, sehingga mengurangi nilai beban perjalanan biasa pada tahun 2023 (Setoran sisa perjalanan dinas tahun 2023 yang disetor tahun 2024 terlampir).

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp4.591.640.36
8,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp4.591.640.368,00 dan Rp4.635.771.805,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.226.960.364	4.070.755.110	156.205.254	3,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.001.510	7.001.510	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	15.400.000	15.400.000	-	-
Jumlah Penyusutan	4.249.361.874	4.093.156.620	156.205.254	3,82
Beban Amortisasi	342.278.494	542.615.185	(200.336.691)	(36,92)
Jumlah Amortisasi	342.278.494	542.615.185	(200.336.691)	(36,92)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.591.640.368	4.635.771.805	(44.131.437)	(0,95)

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp44.131.437,00 atau 0,95% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022, karena penurunan nilai buku aset tak berwujud (software).

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(253.500,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang PNPB dan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai minus Rp253.500,00 dan Rp253.500,00.

Beban penyisihan piutang tak tertagih senilai minus Rp253.500,00 merupakan mutasi dari pelunasan piutang tahun 2022.

Surplus/(Defisit) dari

Kegiatan Non
Operasional
Rp93.431.989
,00

D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp93.431.989,00 dan Rp280.797.848,00.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	86.781.989	220.970.298	(134.188.309)	(60,73)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.650.000	59.827.550	(53.177.550)	(88,88)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	93.431.989	280.797.848	(187.365.859)	(66,73)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp187.365.859,00 karena menurunnya nilai pendapatan non operasional lainnya.

D.9.1. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp86.781.989,00 dan Rp220.970.298,00.

Rincian Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.1
Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	86.781.989	220.970.298	(134.188.309)	(60,73)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Surplus/(Defisit)Pelepasan Aset Non Lancar	86.781.989	220.970.298	(134.188.309)	(60,73)

Surplus/Defisit dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2023 menurun senilai Rp134.188.309,00 karena penurunnya pendapatan lelang ditahun 2023. Pendapatan Lelang tersebut berupa lelang 2 (dua) unit kendaraan operasional Itjentan roda 4 yang disetor pada bulan Desember 2023. Tidak terdapat perbedaan nilai Surplus/Defisit dari pelepasan aset non lancar dan nilai pendapatan pada LRA.

D.9.2. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai nihil karena pada Itjentan tidak terdapat kewajiban jangka Panjang.

D.9.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp6.650.000,00 dan Rp59.827.550,00.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.3.1
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	30 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.650.000	59.827.550	(53.177.550)	(88,88)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6.650.000	59.827.550	(53.177.550)	(88,88)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 menurun senilai Rp53.117.550,00 atau 88,88% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 karena menurunnya nilai pendapatan non operasional lainnya.

D.9.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp6.650.000,00 dan Rp59.827.550,00.

Rincian Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.3.1.1
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	-	8.952.250	(8.952.250)	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6.650.000	50.875.300	(44.225.300)	(86,93)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.650.000	59.827.550	(53.177.550)	(88,88)

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 menurun senilai Rp53.177.550,00 atau 88,88%, karena pada tahun 2023 pendapatan non operasional lainnya hanya berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian kelebihan tunjangan fungsional, sedangkan pada tahun 2022 terdapat pendapatan dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel D.9.3.1.2
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pada LO dan LRA Per 31 Desember 2023

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6.650.000	57.350.000	(50.700.000)
	Jumlah	6.650.000	57.350.000	(50.700.000)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 pada Laporan Operasional adalah senilai Rp6.650.000,00 dan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah senilai Rp57.350.000,00 sehingga terdapat selisih Rp50.700.000,00 yang merupakan penjumlahan akrual dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak karena adanya pelunasan piutang tahun 2022 dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional auditor.

D.9.3.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing bernilai nihil, karena tidak ada transaksi non operasional lainnya yang dapat menjadi beban.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp11.039.122.682,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.039.122.682,00 dan Rp12.899.141.888,00.

Surplus(defisit) LO
Rp(128.803.649.812,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa (laporan Operasional).

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp128.803.649.812,00 dan Rp96.626.136.494,00.

Koreksi Yang
Menambah
/Mengurangi
Ekuitas Rp0,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp76.792.760,00. Pada tahun 2023 tidak terdapat Koreksi yang menambah dan atau mengurangi nilai Ekuitas.

Transaksi Antar
Entitas
Rp126.243.197.645,0
0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp126.243.197.645,00 dan Rp94.842.910.048,00.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel E.4
Rincian Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Ditagihkan Ke Entitas Lain	127.765.411.183	94.970.856.461	32.794.554.722	34,53
Diterima dari Entitas Lain	(148.650.007)	(230.097.848)	81.447.841	(35,40)
Transfer Masuk	33.750.000	525.622.000	(491.872.000)	(93,58)
Transfer Keluar	(1.407.313.531)	(423.470.565)	(983.842.966)	232,33
Jumlah Transaksi Antar Entitas	126.243.197.645	94.842.910.048	31.400.287.597	33,11

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Inspektorat Jenderal yang melibatkan ke Kas Negara (BUN).

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan Ke Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Inspektorat Jenderal yang melibatkan ke Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) senilai Rp148.650.007,00 sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) senilai Rp127.765.411.183,00.

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

1. Transfer Masuk berupa 1 unit AC Split dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp37.500.000, dengan Nomor BAST. B.2370/PL.210/C.1/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan akumulasi penyusutan terhadap aset tersebut senilai Rp3.750.000,00 sehingga transfer masuk per 30 September 2023 setelah di senilai Rp33.750.000,00.
2. Transfer keluar senilai Rp1.407.313.531,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Transfer Keluar ke Biro Keuangan dan BMN senilai Rp41.107.000,00 berupa 1 unit *Telephone Mobile* senilai Rp9.974.000 dengan Nomor BAST-B.2894/PL.300/G.1/08 /2023 tanggal 3 Agustus 2023 dan 1 unit *Lap Top* senilai Rp31.133.000 dengan Nomor. BAST-B.2894/PL.300/G.1/08 /2023 tanggal 3 Agustus 2023, dikurangi akumulasi penyusutan terhadap 2 aset tersebut senilai Rp33.323.750,00 sehingga nilai Transfer Keluar setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp7.783.250,00.
- b. Transfer Keluar ke Biro keuangan dan BMN senilai Rp922.790.281,00 yang merupakan pengadaan Renovasi Gedung B(Aset Tetap dalam Renovasi) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pekerjaan renovasi dinding ruangan eselon I senilai Rp197.860.000,00.
 - 2) Pekerjaan renovasi lantai ruang Inspektur Investigasi senilai Rp197.994.250,00.
 - 3) Pekerjaan renovasi lantai ruang Eselon I senilai Rp29.779.918,00.
 - 4) Pekerjaan renovasi dinding ruang Tata Usaha Eselon I sebesar Rp 45.222.500,00.
 - 5) Pekerjaan renovasi lantai ruang Tata Usaha Eselon I sebesar Rp 118.970.000,00.
 - 6) Pekerjaan renovasi kamar mandi dan ruang istirahat Irjen senilai Rp109.333.613,00.
 - 7) Pekerjaan Penataan Ruang Rapat Lantai 6 senilai Rp78.212.000,00.
 - 8) Pekerjaan Penataan Ruang Kerja Lantai 2 senilai Rp62.845.000,00.
 - 9) Pekerjaan Penataan Ruang Kerja Lantai 4 senilai Rp82.573.000,00.

- c. Transfer keluar 22 unit peralatan *Mainframe* lainnya (RAM) Merk *Dell Memory Update-32-GB-2RX4 RDIMM* senilai Rp476.740.000,00 dengan BAST Nomor BAST-B.4426/PL.300/G.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Ke Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp(2.560.452.167,00)

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penuruna Ekuitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing penurunan sebesar Rp2.560.452.167,00 dan penurunan sebesar Rp1.860.019.206,00.

Ekuitas Akhir
Rp8.478.670.515,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.478.670.515,00 dan Rp11.039.122.682,00.

Ekuitas akhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp8.478.670.515,00 adalah Ekuitas Awal senilai Rp11.039.122.682,00 dikurang penurunan Ekuitas senilai Rp2.560.452.167,00.

Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2023 sama dengan nilai ekuitas pada Laporan Neraca periode 31 Desember 2023.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Kementerian Negara/Lembaga wajib menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang mempunyai konsep *single database* yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menerapkan aplikasi SAKTI dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 dan melaksanakan proses Rekonsiliasi data pada SAKTI dan SPAN pada aplikasi MONSAKTI. Nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI Eselon I.
2. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan tahun 2023, satuan kerja telah melakukan tutup buku pada modul Aset, modul persediaan dan tutup buku permanen pada Modul GLP bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
3. Proses Rekonsiliasi antara nilai SPAN (Kementrian Keuangan) dan SAKTI (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian) periode Tahun 2023 pada aplikasi MONSAKTI telah diselesaikan tepat waktu dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) pada tanggal 26 Januari 2023. Berdasarkan SHR tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah dan TDK COA.
4. Anggaran belanja untuk penanganan Pandemi *Covid-19* yang semula dianggarkan senilai Rp1.657.219.000,00 pada Semester II tahun 2024 dilakukan revisi menjadi senilai Rp38.722.000,00, hal ini dikarenakan dengan terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan No.S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 akun khusus Covid-19 hanya

digunakan sampai dengan semester I tahun 2023, sehingga sisa anggaran akun covid harus direvisi dan pada semester II tahun 2023 penggunaan akun Covid -19 harus dihentikan. Pada Semester II tahun 2023 tidak menggunakan akun Covid, realisasi akun Covid sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp20.717.160,00.

5. Terjadi kesalahan penginputan pada modul komitmen terhadap pengadaan belanja modal berupa 1 (satu) unit tas koper (untuk kebutuhan poliklinik) yang seharusnya tercatat senilai Rp1.999.000,00 diinput pada modul komitmen senilai Rp1.999.999,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp9.999,00. Terhadap transaksi tersebut sudah didetailkan, validasi dan approve pada modul Aset, sehingga tidak dapat diperbaiki pada modul komitmen. Terhadap transaksi tersebut diterbitkan SPM dan SP2D senilai Rp1.999.999,00 dan kelebihan pembayaran senilai Rp999,00 dikembalikan ke Kas Negara dan pada modul Aset dilakukan koreksi senilai Rp999,00. terhadap transaksi tersebut membentuk belanja modal peralatan dan mesin di posisi kredit sehingga pada to do list terdapat saldo tidak normal, sehingga dilakukan jurnal penyesuaian yaitu akun peralatan dan mesin senilai Rp999,00 pada posisi debet dan akun koreksi non aset senilai Rp999,00 pada posisi kredit.
6. Berdasarkan hasil Monitoring Rekonsiliasi data Aset, Persediaan dan Piutang melalui aplikasi Monsakti terdapat perbedaan data yaitu pada nilai Neraca tercatat senilai Rp8.505.797.156,00 dan pada nilai Subledger senilai Rp8.491.780.450,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp14.016.706,00. Hal tersebut dikarenakan adanya jurnal pencatatan piutang lainnya senilai Rp14.016.706,00 yang merupakan kelebihan pembayaran uang makan tahun 2023. Terhadap kelebihan uang makan tersebut telah dilunasi pada tanggal 12 Februari 2024, maka pencatatan piutang dilakukan melalui jurnal umum.
7. Total Barang Milik Negara (Intrakomtabel) senilai Rp45.726.794.547,00 yang telah ditetapkan Rp45.367.500.073,00 dan 60 unit senilai Rp359.294.476,00 dalam proses usulan status penggunaan ke Biro Keuangan dan BMN dengan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor. B-4629/PL.300/G.1/12/2003 tanggal 29

Desember 2023 tentang Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta.

8. Terdapat pemindahtangan dengan cara penjual aset tetap berupa 2 unit kendaraan operasional kantor roda 4 senilai Rp277.090.500,00 dengan Risalah Lelang Nomor 1269/26/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan pendapatan lelang senilai Rp86.781.989,00 dengan Nomor NTPN 886460N9VRR94RQE tanggal 21 Desember 2023.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta keamanan dana APBN, Kementerian Keuangan melakukan modernisasi Rekening Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara dan Lembaga, pada PMK tersebut disampaikan bahwa rekening pengeluaran pada satuan kerja dilakukan restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (*virtual account*). Pada tanggal 29 Desember 2020 satker Itjen telah melakukan penutupan rekening Itjen Kementan dengan Nomor rekening 127-00-8700019-4, dan pada tahun 2021 dilakukan pembukaan rekening baru dengan nama pemilik rekening **BPG 139 Itjen Kementan**, dan nomor rekening 8100122382471000. Saldo Rekening Itjentan per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Data tersebut berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2023. (Rekening Koran terlampir).

F.4. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

1. Monitoring Tidak Lanjut Hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dari Tahun 2015 samapai dengan 2021 dan Laporan PDTT Banpem lingkup kementerian Pertanian dari Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III tahun 2022, terlampir.
2. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Lingkup satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023, sebagai berikut :

- a. Reviu Pra LAKIN TA.2022 terdapat 5 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada tindak lanjut yang terselesaikan sehingga masih tersisa 5 rekomendasi yang harus diselesaikan.
- b. Reviu Laporan Keuangan Semester II TA.2022 terdapat 3 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi dan seluruhnya telah terselesaikan, namun untuk Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 terdapat 5 Rekomendasi dan belum diselesaikan.
- c. Reviu Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Itjentan tahun 2024 terdapat 2 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, dan semua telah terselesaikan.
- d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) terdapat 1 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, sampai dengan 31 Desember 2023 rekomendasi belum terselesaikan.
- e. Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Itjentan Tahun Anggaran 2022-2023 terdapat 5 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada tindak lanjut yang terselesaikan sehingga masih tersisa 5 rekomendasi yang harus diselesaikan.
- f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdapat 2 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, sampai dengan 31 Desember 2023 belum ada tindak lanjut yang terselesaikan sehingga masih tersisa 2 rekomendasi yang harus diselesaikan
- g. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), pagu Indikatif Itjentan TA.2024 terdapat 36 rekomendasi yang bersifat teknis atau administrasi, telah diselesaikan 35 rekomendasi sehingga 1 rekomendasi belum diselesaikan.